

PERAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DALAM PENGELOLAAN SEKTOR PERTAMBANGAN GORONTALO MINERAL SEBAGAI SUMBER MATA PENCAHARIAN MASYARAKAT SUWAWA

Fadlia Hulukati¹, Agus Pariono², Resalinda Ngabiu³,
Nabila Nurul Hakim Dano⁴, Taufik Hidayatullah Bakari⁵,
Octaviani Suryaningsih Masaguni⁶

Universitas Bina Taruna Gorontalo

hulukatifamily@gmail.com¹, guspri811@gmail.com², resalindangabiu50@gmail.com³,
nabiladano01@gmail.com⁴, taufikbakari4@gmail.com⁵

ABSTRAK

Sektor pertambangan Gorontalo Mineral memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah sekaligus menjadi sumber mata pencaharian masyarakat Suwawa. Namun demikian, pengelolaannya masih menghadapi berbagai tantangan administrasi pembangunan yang memengaruhi efektivitas dan keberlanjutannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran administrasi pembangunan dalam pengelolaan sektor pertambangan Gorontalo Mineral sebagai sumber mata pencaharian masyarakat Suwawa. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa administrasi pembangunan memiliki peran penting dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pertambangan, yang secara langsung berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, dan aktivitas ekonomi masyarakat Suwawa. Kendala utama yang diidentifikasi meliputi keterbatasan koordinasi antarinstansi dan lemahnya mekanisme pengawasan. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan administrasi pembangunan yang efektif dan berkelanjutan menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola pertambangan yang produktif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Keywords: **Administrasi Pembangunan, Pengelolaan Pertambangan, Mata Pencaharian, Masyarakat Suwawa.**

ABSTRACT

The Gorontalo Mineral mining sector plays a strategic role in supporting regional development and serves as a livelihood source for the Suwawa community. However, its management still faces challenges in development administration that affect its effectiveness and sustainability. This study aims to analyze the role of development administration in managing the Gorontalo Mineral mining sector as a source of livelihood for the Suwawa community. The research employs a descriptive qualitative approach with a case study design. Findings reveal that development administration plays a crucial role in the planning, implementation, and supervision stages of mining management, contributing to increased income, employment opportunities, and local economic activity. Major obstacles include limited inter-agency coordination and weak monitoring mechanisms. Strengthening effective and sustainable development administration is therefore essential to ensure that regional mining management supports both productivity and community welfare.

Keywords: **Development Administration, Mining Management, Livelihood, Suwawa**

Fadlia Hulukati, Cs: Peran Administrasi Pembangunan Dalam Pengelolaan Sektor

Page. 149

Community.

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah di Indonesia merupakan bagian integral dari upaya nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Djaba dkk., 2025; Mokodongan dkk., 2025). Salah satu sektor yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah adalah sektor pertambangan (Farhan Setyo Oetomo, 2025; Hidayat dkk., 2016; Syofiarti, 2022). Sektor ini tidak hanya menjadi sumber devisa dan pendapatan daerah, tetapi juga menjadi tulang punggung bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat di wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam tinggi (Hanida dkk., 2019). Gorontalo Mineral merupakan salah satu sektor unggulan di Provinsi Gorontalo yang berperan penting dalam memperkuat perekonomian lokal, terutama di wilayah Suwawa.

Suwawa dikenal sebagai wilayah dengan aktivitas pertambangan yang cukup intensif dan menjadi pusat ekonomi masyarakat setempat. Bagi sebagian besar warga, sektor pertambangan merupakan sumber mata pencaharian utama yang menopang kebutuhan hidup mereka. Namun, meskipun pertambangan memberikan dampak ekonomi yang positif, pengelolaannya masih dihadapkan pada berbagai tantangan administratif dan tata kelola (Soedarto dkk., 2023). Administrasi pembangunan sebagai instrumen utama dalam mengatur jalannya pembangunan di sektor publik memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa aktivitas pertambangan berjalan efektif, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat (Holqi & Salam, 2024; Mokodongan, Van Gobel, dkk., 2025).

Kelemahan dalam sistem administrasi pembangunan sering kali menyebabkan ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Di banyak daerah, termasuk Gorontalo, muncul persoalan seperti tumpang tindih kewenangan antarinstansi, lemahnya pengawasan lingkungan, dan minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara potensi ekonomi yang besar dari sektor pertambangan dengan manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat di tingkat akar rumput.

Administrasi pembangunan yang efektif pada dasarnya berfungsi sebagai jembatan antara kebijakan publik dengan pelaksanaan program di lapangan. Dalam konteks pengelolaan pertambangan, administrasi pembangunan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap tahap pembangunan mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas (Mokodongan, Masaguni, dkk., 2025). Kegagalan dalam menerapkan prinsip-prinsip ini dapat mengakibatkan penyimpangan kebijakan, ketimpangan sosial, serta kerusakan lingkungan yang sulit dipulihkan.

Masyarakat Suwawa sebagai kelompok yang bergantung langsung pada kegiatan

pertambangan menghadapi dinamika sosial ekonomi yang kompleks. Di satu sisi, mereka menikmati peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja; di sisi lain, mereka juga menghadapi ancaman seperti ketergantungan ekonomi dan penurunan kualitas lingkungan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem administrasi pembangunan yang mampu menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian sumber daya alam. Pendekatan pembangunan yang berkelanjutan harus menjadi arah kebijakan yang dipegang teguh oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

Beberapa penelitian terdahulu menyoroti pentingnya tata kelola pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat (Katili dkk., 2025; Nugroho, 2023; Ansell dkk., 2023). Namun, sebagian besar studi tersebut lebih menitikberatkan pada kebijakan di tingkat makro dan belum banyak mengulas dinamika administratif di tingkat komunitas lokal. Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menelaah secara mendalam peran administrasi pembangunan dalam konteks lokal, khususnya di sektor pertambangan Gorontalo Mineral.

Administrasi pembangunan yang ideal tidak hanya berperan dalam merancang kebijakan, tetapi juga dalam membangun kapasitas kelembagaan dan mendorong kolaborasi lintas sektor. Penerapan prinsip partisipatif dan kolaboratif dalam administrasi pembangunan menjadi penting agar masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, melainkan juga subjek yang berperan aktif dalam setiap tahapannya. Keberhasilan pembangunan daerah sejatinya diukur dari sejauh mana masyarakat terlibat dalam proses dan memperoleh manfaat nyata dari kegiatan ekonomi yang berlangsung di sekitarnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran administrasi pembangunan dalam pengelolaan sektor pertambangan Gorontalo Mineral sebagai sumber mata pencaharian masyarakat Suwawa. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat serta memastikan keberlanjutan sumber daya alam di wilayah tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode campuran (*mixed methods*), untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai peran administrasi pembangunan dalam pengelolaan sektor pertambangan Gorontalo Mineral. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan survei daring. Observasi dilakukan di wilayah Suwawa untuk mengamati aktivitas masyarakat dalam kegiatan pertambangan, sedangkan wawancara dilakukan kepada pelaku tambang, aparat pemerintah, dan tokoh masyarakat guna menggali pandangan serta pengalaman mereka terhadap tata kelola pertambangan (Haq & Yasin, 2025; Creswell & Guetterman, 2025; Johnson & Christensen, 2020; Amila Nkk Gamage,

2025).

Selain itu, survei daring dilakukan untuk memperoleh data pendukung mengenai persepsi masyarakat terhadap dampak ekonomi dan sosial dari kegiatan pertambangan. Data kualitatif dianalisis menggunakan model Miles & Huberman, (1994) melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sementara itu, data kuantitatif diolah secara deskriptif dalam bentuk tabel dan persentase guna memperkuat hasil temuan lapangan. Penggabungan kedua jenis data dilakukan dengan prinsip triangulasi untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian (Parjaman & Akhmad, 2019).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Administrasi Pembangunan dalam Pengelolaan Pertambangan Hasil penelitian menunjukkan bahwa administrasi pembangunan dalam pengelolaan sektor pertambangan Gorontalo Mineral dijalankan melalui tiga fungsi utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Ketiga fungsi ini saling terkait dan membentuk kerangka utama dalam mengarahkan kebijakan pertambangan agar berjalan sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks Suwawa, implementasi administrasi pembangunan masih bersifat parsial dan belum terintegrasi sepenuhnya, terutama dalam hal koordinasi antarinstansi dan partisipasi masyarakat.

Pada tahap perencanaan, pemerintah daerah telah menetapkan sejumlah kebijakan dan program yang berkaitan dengan perizinan serta pengelolaan sumber daya tambang. Namun, pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan masih sangat terbatas dan bersifat informatif. Masyarakat sering kali hanya dilibatkan pada tahap sosialisasi, bukan dalam perumusan kebijakan. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan kurang mencerminkan aspirasi masyarakat setempat yang paling terdampak oleh aktivitas pertambangan.

Dalam tahap pelaksanaan, aktivitas pertambangan Gorontalo Mineral memberikan dampak ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat Suwawa. Banyak masyarakat yang mendapatkan pekerjaan baik secara langsung di area pertambangan maupun secara tidak langsung melalui sektor jasa dan perdagangan lokal. Efek berganda dari kegiatan pertambangan ini telah meningkatkan aktivitas ekonomi di wilayah sekitar. Namun, manfaat ekonomi tersebut belum diimbangi dengan penguatan kapasitas administrasi yang memadai untuk mengatur, mengawasi, dan menyeimbangkan aspek sosial serta lingkungan.

Pelaksanaan kebijakan juga masih menghadapi kendala dalam hal koordinasi lintas lembaga (Ansell, 2012; Ansell dkk., 2020; Ansell dkk., 2020). Beberapa instansi yang memiliki kewenangan berbeda sering kali tidak berkomunikasi secara efektif dalam hal perizinan dan pengawasan. Hal ini menimbulkan tumpang tindih kebijakan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan mengurangi efisiensi dalam

pelaksanaan pembangunan. Administrasi pembangunan yang seharusnya menjadi alat koordinasi antaraktor justru sering kali menjadi sumber hambatan karena lemahnya integrasi kelembagaan (Ansell dkk., 2021; Ansell dkk., 2022).

Pada aspek pengawasan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengawasan terhadap aktivitas pertambangan belum berjalan optimal. Pengawasan yang dilakukan masih bersifat administratif dan belum menyentuh aspek sosial serta lingkungan secara mendalam. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas pengawasan. Dalam banyak kasus, pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan dan keselamatan kerja baru terdeteksi setelah menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.

Selain itu, sistem pelaporan dan transparansi informasi terkait pengelolaan tambang masih lemah. Informasi mengenai hasil produksi, dampak lingkungan, maupun rencana reklamasi belum disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Ketidadaan mekanisme pelaporan yang partisipatif menyebabkan masyarakat tidak memiliki akses terhadap data penting yang dapat digunakan untuk mengawasi aktivitas pertambangan di daerah mereka sendiri.

Dalam konteks sosial, masyarakat Suwawa masih ditempatkan sebagai penerima dampak, bukan mitra strategis dalam tata kelola pembangunan. Padahal, keberhasilan administrasi pembangunan bergantung pada keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Masyarakat yang diberdayakan memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan yang turut menjaga keberlanjutan kegiatan pertambangan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa administrasi pembangunan di sektor pertambangan Gorontalo Mineral telah memberikan dampak positif dalam membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, kelemahan pada aspek koordinasi, partisipasi, dan pengawasan menunjukkan bahwa sistem administrasi pembangunan yang ada masih perlu diperkuat. Penguatan kelembagaan, transparansi informasi, dan peningkatan kapasitas masyarakat lokal menjadi langkah penting untuk menciptakan tata kelola pertambangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Persepsi Masyarakat terhadap Dampak Pertambangan

Kegiatan pertambangan Gorontalo Mineral memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Suwawa. Berdasarkan hasil survei daring yang dilakukan kepada responden dari berbagai lapisan masyarakat, diperoleh gambaran bahwa mayoritas masyarakat menilai sektor pertambangan memiliki dampak positif terhadap mata pencaharian mereka. Persepsi ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa sektor tambang telah membuka peluang kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di wilayah tersebut. Masyarakat merasakan peningkatan

pendapatan dan tersedianya alternatif pekerjaan yang sebelumnya sulit diperoleh dari sektor pertanian atau perikanan tradisional.

Namun demikian, persepsi positif ini tidak berdiri sendiri. Sebagian responden juga mengungkapkan adanya kekhawatiran terhadap keberlanjutan kegiatan pertambangan dan dampak sosial yang ditimbulkannya. Ketergantungan ekonomi masyarakat pada sektor tambang dinilai cukup tinggi, sehingga jika terjadi penurunan aktivitas produksi atau penghentian operasi tambang, masyarakat berisiko kehilangan sumber penghidupan utama. Ketergantungan ini menciptakan kerentanan ekonomi yang potensial, terutama bagi kelompok pekerja informal yang tidak memiliki jaminan pendapatan tetap.

Hasil survei daring yang dilakukan terhadap masyarakat Suwawa memperlihatkan rincian berikut:

Tabel 1. Hasil survei daring

Aspek yang Dinilai	Persentase Respon Positif	Keterangan
Peningkatan pendapatan	68%	Sebagian besar masyarakat merasakan peningkatan penghasilan pasca beroperasinya tambang
Kesempatan kerja	74%	Tambang membuka lapangan kerja langsung dan tidak langsung di berbagai sektor
Stabilitas mata pencaharian	61%	Sebagian masyarakat menilai pekerjaan di sektor tambang cukup berkelanjutan
Kesejahteraan keluarga	65%	Meningkatnya kemampuan ekonomi dan daya beli keluarga
Lingkungan sosial	52%	Hubungan sosial masyarakat sedikit terpengaruh akibat pergeseran profesi dan gaya hidup

Sumber: Analisis Peneliti, 2025

Hasil di atas menunjukkan bahwa dimensi ekonomi mendapatkan apresiasi tertinggi dari masyarakat, khususnya pada aspek kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan. Ini mengindikasikan bahwa sektor pertambangan masih dianggap sebagai motor utama perekonomian lokal. Sementara itu, aspek stabilitas pekerjaan dan kesejahteraan keluarga juga menunjukkan dampak positif meskipun tidak sebesar dua aspek sebelumnya. Namun, dimensi sosial, terutama yang berkaitan dengan hubungan masyarakat dan perubahan nilai-nilai sosial, memperoleh tingkat penilaian yang lebih rendah.

Temuan ini memperlihatkan adanya pergeseran struktur sosial di masyarakat Suwawa. Aktivitas pertambangan membawa perubahan dalam pola interaksi sosial, orientasi ekonomi, dan gaya hidup masyarakat. Banyak masyarakat yang dulunya bekerja di sektor agraris kini beralih menjadi pekerja tambang atau pelaku usaha pendukung tambang, seperti jasa angkutan dan perdagangan. Pergeseran ini di satu sisi meningkatkan dinamika ekonomi, tetapi di sisi lain juga memunculkan ketimpangan sosial antara kelompok yang mendapatkan keuntungan langsung dari aktivitas tambang dengan kelompok yang tidak terlibat secara langsung.

Dari sisi ekonomi, peningkatan pendapatan keluarga memberikan dampak positif

Fadlia Hulukati, Cs: Peran Administrasi Pembangunan Dalam Pengelolaan Sektor Page. 154

terhadap daya beli dan kualitas hidup masyarakat. Beberapa responden menyatakan bahwa mereka kini mampu memenuhi kebutuhan dasar, bahkan sebagian dapat mengakses pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih baik. Namun demikian, peningkatan pendapatan tidak selalu diikuti oleh perencanaan keuangan yang baik. Sebagian masyarakat masih bersifat konsumtif, dan belum banyak yang mengalokasikan pendapatannya untuk kegiatan produktif jangka panjang.

Selain dampak ekonomi, penelitian ini juga menemukan adanya perubahan pada aspek sosial-budaya masyarakat. Kehadiran tambang telah memunculkan mobilitas sosial baru, di mana kelompok masyarakat yang bekerja di sektor tambang memiliki posisi ekonomi yang relatif lebih baik dibandingkan mereka yang bekerja di sektor tradisional. Hal ini menimbulkan perbedaan status sosial yang berpotensi menciptakan jarak antarwarga. Meski belum muncul konflik sosial yang berarti, ketimpangan ini perlu dikelola melalui kebijakan sosial yang memperhatikan aspek pemerataan kesejahteraan.

Aspek lingkungan menjadi salah satu dimensi yang menimbulkan persepsi beragam di kalangan masyarakat. Sebagian masyarakat mengakui adanya perubahan kondisi lingkungan seperti meningkatnya debu, berkurangnya vegetasi, dan perubahan pola aliran air. Namun, kesadaran masyarakat terhadap dampak lingkungan masih relatif rendah karena manfaat ekonomi jangka pendek lebih terasa dibandingkan dampak ekologis jangka panjang. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dalam aktivitas pertambangan.

Dari sisi administrasi pembangunan, persepsi masyarakat ini mencerminkan sejauh mana kebijakan pemerintah daerah mampu menjawab kebutuhan ekonomi sekaligus menjaga keseimbangan sosial dan lingkungan. Pemerintah daerah masih perlu memperkuat komunikasi publik agar masyarakat memahami arah kebijakan pertambangan dan dapat berperan aktif dalam proses pengawasan. Transparansi dan partisipasi publik menjadi dua elemen penting yang harus diperkuat agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga mitra aktif dalam menjaga keberlanjutan sektor tambang.

Secara keseluruhan, persepsi masyarakat Suwawa terhadap sektor pertambangan menunjukkan pola yang dualistik: optimisme ekonomi di satu sisi dan kekhawatiran sosial-lingkungan di sisi lain. Pola ini menandakan perlunya pendekatan administrasi pembangunan yang lebih inklusif, di mana masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan, diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi, dan didorong untuk berpartisipasi dalam menjaga keseimbangan pembangunan. Dengan demikian, pengelolaan pertambangan dapat menjadi instrumen pembangunan daerah yang berorientasi tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan sosial dan ekologis.

Analisis Tematik Peran Administrasi Pembangunan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran administrasi pembangunan dalam pengelolaan sektor pertambangan Gorontalo Mineral mencakup tiga aspek utama: perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Ketiga aspek ini berfungsi sebagai sistem yang saling berkaitan dalam mewujudkan tata kelola pertambangan yang efektif. Namun, temuan lapangan memperlihatkan bahwa implementasi administrasi pembangunan masih belum optimal, terutama pada aspek partisipasi masyarakat dan koordinasi antarinstansi pemerintah.

Secara teoritis, administrasi pembangunan berperan sebagai alat penggerak pembangunan yang menjembatani kebijakan publik dengan pelaksanaan di lapangan (Asteriniah & Hestiriniah, 2023). Dalam konteks Gorontalo, pelibatan masyarakat masih bersifat informatif, belum pada tahap partisipatif. Keterbatasan tersebut membuat kebijakan tambang belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat lokal.

Temuan penelitian juga memperkuat pandangan Hidayat dkk., (2016) bahwa keberhasilan administrasi pembangunan sangat ditentukan oleh kapasitas kelembagaan dan koordinasi antarinstansi. Kurangnya sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pengawas, dan pelaku tambang menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan. Hal ini menyebabkan kebijakan pembangunan tambang cenderung berorientasi ekonomi, dengan perhatian yang minim terhadap aspek sosial dan lingkungan.

Selain itu, analisis lapangan menunjukkan bahwa kegiatan tambang telah meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi belum menjamin pemerataan kesejahteraan. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Soleman dkk., (2022) bahwa pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menciptakan kesejahteraan apabila tidak disertai pemerataan manfaat. Oleh karena itu, administrasi pembangunan perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerataan hasil pembangunan.

Dari sisi pengawasan, hasil observasi menunjukkan bahwa sistem kontrol terhadap dampak lingkungan dan sosial belum berjalan efektif. Pengawasan yang bersifat administratif belum menyentuh dimensi keberlanjutan secara menyeluruh. UNDP, (2024); UNDP, (2025) menegaskan bahwa tata kelola pembangunan berkelanjutan menuntut pengawasan yang transparan, partisipatif, dan terintegrasi dengan prinsip *sustainability governance*.

Untuk memperjelas hubungan antara temuan lapangan dan teori administrasi pembangunan, berikut tabel sintesis tematik:

Tabel 2. Hubungan Antara Temuan Lapangan Dan Teori Administrasi

Pembangunan			
Fungsi Administrasi Pembangunan	Temuan Lapangan	Keterkaitan Teori	Implikasi
Perencanaan	Partisipasi masyarakat masih terbatas	Siagian (2016)	Perlu perencanaan kolaboratif dan partisipatif
Pelaksanaan	Dampak ekonomi tinggi, sosial belum merata	Todaro & Smith (2020)	Penguatan program pemberdayaan lokal
Pengawasan	Pengawasan belum terintegrasi	UNDP (2021)	Penerapan sistem pemantauan lingkungan terpadu
Kelembagaan	Koordinasi antarinstansi lemah	Dwiyanto (2018)	Pembentukan forum koordinatif lintas sektor

Sumber: Analisis Peneliti, 2025

Analisis tematik ini menunjukkan bahwa penguatan administrasi pembangunan harus diarahkan pada tiga hal utama: partisipasi masyarakat dalam perencanaan, koordinasi kelembagaan dalam pelaksanaan, dan transparansi dalam pengawasan. Dengan demikian, tata kelola pertambangan dapat menjadi lebih inklusif, adaptif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan di wilayah Suwawa.

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa administrasi pembangunan memiliki peran strategis dalam pengelolaan sektor pertambangan Gorontalo Mineral sebagai sumber mata pencaharian masyarakat Suwawa. Melalui fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, administrasi pembangunan berfungsi mengarahkan kebijakan dan aktivitas pertambangan agar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Aktivitas pertambangan telah menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperluas aktivitas ekonomi masyarakat lokal, namun belum diimbangi dengan sistem tata kelola yang sepenuhnya partisipatif dan berkelanjutan.

Efektivitas administrasi pembangunan masih terkendala oleh lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan pengawasan, dan minimnya keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan. Hal ini menyebabkan kebijakan pertambangan lebih berorientasi pada keuntungan ekonomi jangka pendek, sementara aspek sosial dan lingkungan belum terkelola secara optimal. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan, transparansi kebijakan, dan integrasi antaraktor pembangunan menjadi langkah penting dalam menciptakan tata kelola pertambangan yang berdaya guna dan berkeadilan.

Secara konseptual, administrasi pembangunan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengelolaan kebijakan, tetapi juga sebagai sistem yang menjamin keberlanjutan pembangunan melalui partisipasi dan akuntabilitas publik. Untuk konteks Gorontalo Mineral, penerapan prinsip *good governance* menjadi kunci dalam membangun ekosistem pertambangan yang produktif, inklusif, dan ramah lingkungan.

Dengan demikian, pengelolaan sektor pertambangan tidak hanya menjadi sarana peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga wadah pembentukan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat Suwawa.

Sebagai arah kebijakan ke depan, pemerintah daerah perlu memperkuat integrasi administrasi pembangunan dalam tiga dimensi: kebijakan yang partisipatif, kelembagaan yang kolaboratif, dan pengawasan yang berkelanjutan. Upaya tersebut akan memastikan bahwa kegiatan pertambangan tidak semata menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membangun kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan menjaga kelestarian sumber daya alam bagi generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amila Nkk Gamage. (2025). A comparative analysis of qualitative and mixed methods research: Strengths, limitations, and practical applications. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 25(3), 2040–2046. <https://doi.org/10.30574/wjarr.2025.25.3.0947>
- Ansell, C. (2012). *Collaborative Governance*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199560530.013.0035>
- Ansell, C., Doberstein, C., Henderson, H., Siddiki, S., & 'T Hart, P. (2020). Understanding inclusion in collaborative governance: A mixed methods approach. *Policy and Society*, 39(4), 570–591. <https://doi.org/10.1080/14494035.2020.1785726>
- Ansell, C., Sørensen, E., & Torfing, J. (2021). When Governance Theory Meets Democratic Theory: The Potential Contribution of Cocreation to Democratic Governance. *Perspectives on Public Management and Governance*, 4(4), 346–362. <https://doi.org/10.1093/ppmgov/gvab024>
- Ansell, C., Sørensen, E., & Torfing, J. (2022). *Co-Creation for Sustainability: The UN SDGs and the Power of Local Partnerships*. Emerald Publishing. <https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/58054>
- Ansell, C., Sørensen, E., & Torfing, J. (2023). Public administration and politics meet turbulence: The search for robust governance responses. *Public Administration*, 101(1), 3–22. <https://doi.org/10.1111/padm.12874>
- Asteriniah, F., & Hestiriniah, D. C. (2023). Transforming Governance in Indonesia: Exploring New Frontiers in Public Sector Management. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 13(2), 739. <https://doi.org/10.26858/jiap.v13i2.56222>
- Creswell, J. W., & Guetterman, T. C. (2025). *Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research* (Seventh edition). Pearson Education.
- Djaba, M., Hasan, K., & Mokodongan, R. (2025). Penerapan Manajemen Lingkungan dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Berbasis Sustainable Development di Kota Gorontalo. *Jurnal Manajemen Keuangan Sektor Publik (J-MKSP)*, 1(1), 44–57. <https://doi.org/10.37606/j-mksp.v1i1.305>
- Farhan Setyo Oetomo. (2025). Sentralisasi Kewenangan dalam Pengelolaan Pertambangan atas Penurunan Peran Pemerintah Daerah dalam Pembaharuan hukum pertambangan. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(5), 380–396.
- Fadlia Hulukati, Cs: Peran Administrasi Pembangunan Dalam Pengelolaan Sektor Page. 158

- <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i5.340>
- Hanida, R. P., Syamsurizaldi, S., Rozi, F., & Irawan, B. (2019). Keterlibatan Masyarakat Adat dan Pemerintah Kabupaten dalam Melestarikan Lingkungan Pasca Pengalihan Kewenangan Pengurusan Izin Pertambangan. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 3(3), 274–291. <https://doi.org/10.25077/jakp.3.3.274-291.2018>
- Haq, M., & Yasin, N. (2025). Qualitative, Quantitative, and Mixed Methodology Paradigms. *Journal of Practical Studies in Education*, 6(6), 15–29. <https://doi.org/10.46809/jpse.v6i6.144>
- Hidayat, T., Pratiwi, R. N., & Setyowati, E. (2016). Perencanaan Pengelolaan Tambang Pasir Besi di Kabupaten Kulon Progo dalam Perspektif Good Governance. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(3), 100–114. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2016.002.03.13>
- Holqi, F. G. F., & Salam, A. (2024). Collaborative Governance Sebagai Alternatif Pemerintah Daerah dan Perseroan Dalam Mengatasi Permasalahan Sektor Pertambangan: Studi Program TJSL Tambang Galian C PT. AMS di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 9(1), 78–87. <https://doi.org/10.36982/jpg.v9i1.3665>
- Johnson, B., & Christensen, L. B. (2020). *Educational research: Quantitative, qualitative, and mixed approaches* (Seventh edition). SAGE.
- Katili, A. Y., Arifin, R., & Mokodongan, R. (2025). Governance Capacity Dan Kerentanan Lingkungan Perkotaan: Analisis Peran Birokrasi Dalam Pengelolaan Banjir Dan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Bugis. *Jurnal Administrasi, Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ilmu Sosial (JAEIS)*, 4(3), 110–123.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.
- Mokodongan, R., Katili, A. Y., Djaba, M., & Masaguni, O. S. (2025). Efektivitas Kebijakan Perlindungan Hutan di Provinsi Gorontalo: Studi Kasus PSN Bulango Ulu. *Jurnal Kebijakan Publik, Ilmu Administrasi*, 1(1). <https://doi.org/10.69623/jk-pia.v1i1.168>
- Mokodongan, R., Masaguni, O. S., Djaba, M., & Katili, A. Y. (2025). Manajemen destinasi wisata berkelanjutan dalam meningkatkan daya saing dan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal. *Jurnal Administrasi, Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ilmu Sosial (JAEIS)*, 4(2), 53–63.
- Mokodongan, R., Van Gobel, L., & Al-Hadar, S. (2025). Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Pemenuhan Predikat Nindya Kota Layak Anak di Kota Gorontalo. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 12(3), 1147–1161.
- Nugroho, R. (2023). *Public Policy 7: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik*. PT Elex Media Komputindo.
- Parjaman, T., & Akhmad, D. (2019). Pendekatan Penelitian Kombinasi: Sebagai “Jalan Tengah” Atas Dikotomi Kuantitatif-Kualitatif. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(4), 530–548. <https://doi.org/10.25157/moderat.v5i4.3077>
- Soedarto, T., Kagramanto, L. B., & Anggriawan, T. P. (2023). Penguatan Sanksi

- Administratif Sebagai Perwujudan Perlindungan Lingkungan Guna Sumber Daya Alam Berkelanjutan (Sektor Perkebunan, Pertambangan Dan Kehutanan). *UNES Law Review*, 5(4), 3763–3773. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.692>
- Soleman, R., Ebiyeska, H., Wibowo, M. G., & Nainggolan, B. (2022). The Effect of HDI and Macroeconomic Variables on Economic Growth in Indonesia 2015-2020. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 7(1), 63–74. <https://doi.org/10.20473/jiet.v7i1.34641>
- Syofiarti, S. (2022). Peran Serta Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Pada Kegiatan Pertambangan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 19–36. <https://doi.org/10.24246/jrh.2022.v7.i1.p19-36>
- UNDP. (2024, Februari). *United Nations Development Programme (UNDP) | Department of Economic and Social Affairs*. <https://sdgs.un.org/un-system-sdg-implementation/united-nations-development-programme-undp-56967>
- UNDP. (2025, Januari). *UNDP - Digital Strategy 2022-2025*. <https://digitalstrategy.undp.org/>